

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan sosial yang paling mendasar dihadapi oleh Negara Indonesia hingga saat ini. Masalah kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kekurangan pendapatan semata, melainkan juga sebagai fenomena struktural dan multidimensi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks struktural, kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan dalam sistem ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang membuat sebagian kelompok masyarakat berada dalam posisi yang lemah dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Sementara itu, dalam dimensi multidimensi, kemiskinan mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, air bersih, serta kesempatan ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata.

Badan Pusat Statistik (2025) melaporkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 mencapai 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya pada September 2024 yang sebesar 8,57%. Meskipun tren penurunan tersebut menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi nasional, jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar memperlihatkan bahwa kemiskinan tetap menjadi

tantangan pembangunan yang serius. Penurunan kemiskinan juga tidak merata di 6,73%, sedangkan di pedesaan masih mencapai 11,03%, menandakan adanya kesenjangan kesejahteraan antara wilayah kota dan desa (Antaranews, 2025).

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama. Pertama, rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu akar utama yang menyebabkan kemiskinan terus berlanjut. Individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan terbatas, sehingga sulit memperoleh pekerjaan dengan pendapatan layak. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan produktivitas kerja juga rendah, dan pada akhirnya berimplikasi terhadap rendahnya pendapatan rumah tangga (Lestari, 2023).

Kedua, masalah pengangguran dan pekerjaan informal turut memperburuk kondisi kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, penciptaan lapangan kerja formal belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap dan tanpa jaminan sosial, sehingga rentan terhadap guncangan ekonomi (Bisa.or.id, 2024).

Ketiga, urbanisasi yang pesat juga menjadi faktor penyebab kemiskinan baru di wilayah perkotaan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan fasilitas yang memadai. Akibatnya, muncul permukiman kumuh, pengangguran terselubung, dan meningkatnya kelompok miskin di perkotaan. Data Kompas (2023) menunjukkan

bahwa sebagian besar migran ke kota besar berasal dari kelompok berpendidikan rendah, yang sulit terserap dalam sektor industri modern.

Keempat, ketimpangan ekonomi dan distribusi pendapatan masih menjadi persoalan klasik yang memperburuk kondisi kemiskinan. Ketimpangan ini muncul karena perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti modal, tanah, pendidikan, dan teknologi. Kelompok kaya cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam mengakumulasi aset dan investasi, sedangkan kelompok miskin semakin terpinggirkan. Ketimpangan ini bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial yang dapat memicu ketegangan sosial (Liputan6, 2024).

Pola konsumsi, pendidikan anak, kesehatan, dan perumahan juga menunjukkan ciri khusus di kalangan masyarakat miskin. Dalam konsumsi pangan, rumah tangga miskin cenderung memilih makanan yang lebih murah dan berenergi tinggi tapi kurang bernutrisi, mengurangi variasi gizi atau frekuensi makan ketika pendapatan menurun. Anak balita yang berasal dari keluarga dengan pendapatan yang lebih rendah memiliki resiko 5,385 kali lebih besar untuk mengalami stunting dibandingkan dengan anak balita yang berasal dari keluarga dengan pendapatan yang cukup (Yanti et al., 2023).

Di bidang pendidikan, pendapatan yang terbatas menyebabkan rumah tangga menunda atau menghentikan sekolah anak, atau anaknya ikut bekerja untuk membantu penghasilan keluarga. Akses kesehatan juga terbatas seperti biaya transportasi, obat atau pengobatan sering ditunda atau diabaikan karena tidak cukup

dana, yang berarti kondisi kesehatan menjadi lebih rentan. Perumahan pun umumnya berada di lingkungan yang kurang layak seperti kepemilikan rumah rendah, sanitasi dan lingkungan kurang memadai, dan risiko kerentanan terhadap bencana atau kondisi lingkungan yang buruk lebih tinggi. Syafira & Nucke (2025) Menjelaskan salah satu karakteristik rumah tangga sangat miskin adalah tidak memiliki rumah sendiri, memiliki sanitasi buruk dan tidak memiliki listrik.

Untuk bertahan hidup, rumah tangga miskin mengembangkan berbagai strategi adaptif. Pertama melalui diversifikasi pendapatan yang dimana anggota keluarga sering mengambil pekerjaan sekaligus atau mencari pekerjaan musiman sebagai penopang tambahan. Kedua memanfaatkan jaringan sosial informal melalui keluarga besar, atau komunitas lokal berbagi makanan, pinjaman informal, atau bantuan tenaga kerja yang disebut sebagai *Informal social protection*. Ketiga, penyesuaian konsumsi dengan cara mengurangi pengeluaran non-esensial, menunda kebutuhan kesehatan, mengganti jenis makanan ke yang lebih murah, atau menarik anak dari sekolah agar ongkos sehari-hari berkurang. Keempat memanfaatkan beberapa program bantuan sosial atau subsidi pemerintah ketika tersedia, sebagai jaring pengaman jika kondisi ekonomi sangat memburuk. Fuad (2024) menunjukkan bahwa probabilitas pekerja informal mengalami kerentanan sangat tinggi (0,4578) akibat variabel-variabel seperti pendapatan bulanan, catatan keuangan, tingkat pendidikan, lama bekerja, teknologi dan jam kerja.

Kemiskinan secara langsung menggerogoti kesejahteraan keluarga, anak-anak dari rumah tangga miskin lebih beresiko mengalami putus sekolah atau menunda pendidikan karena harus bekerja atau membantu ekonomi keluarga,

sementara keterbatasan ekonomi juga menyebabkan penundaan pengobatan dan konsumsi pangan bergizi yang berujung pada masalah kesehatan seperti stunting. Dampak ini tidak hanya bersifat individu tetapi juga merusak modal sosial keluarga, hubungan antar keluarga menjadi tegang akibat tekanan ekonomi, dan investasi jangka panjang (seperti pendidikan) sering dikorbankan demi pemenuhan kebutuhan harian. Bukti empiris dari studi nasional menunjukkan keterkaitan kuat antara status ekonomi rumah tangga, rendahnya akses pendidikan, dan tingginya prevalensi masalah gizi pada anak balita di keluarga berpendapatan rendah (Andi & Setyari, 2023).

Di lingkungan dengan kemiskinan tinggi, risiko munculnya masalah sosial sekunder menjadi lebih besar yang dimana pengangguran berkepanjangan mendorong sebagian warga ke pekerjaan informal yang rentan, anak-anak terdorong bekerja untuk menopang keluarga (*child labor*), dan tekanan ekonomi dapat meningkatkan insiden kriminalitas ringan atau pencurian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pekerja sektor informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, sekitar 57.95% penduduk bekerja berada pada sektor informal, sedangkan pekerja formal sebesar 42,05%. Kondisi tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan mata pencaharian pada pekerjaan yang penghasilannya tidak tetap, perlindungan kerja yang terbatas, serta tinggi kerentanan ekonomi yang lebih tinggi. Dan juga berbagai studi kuantitatif di Indonesia menemukan korelasi positif

antara tingkat kemiskinan/ketimpangan dengan angka pekerja anak dan tingkat kejahatan, meskipun penyebab kriminalitas bersifat multikausal, bukti empiris menunjukkan bahwa pengangguran dan kedalaman kemiskinan adalah faktor signifikan yang meningkatkan kerentanan terhadap tindakan sosial (Maulana & Suryaningrum, 2022).

Kemiskinan di Kota Tanjungpinang masih menjadi persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian serius meskipun secara umum menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang, pada Desember 2024 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,86 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 15,39 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang berada di kisaran 7,95 persen, menandakan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah masa pandemi *COVID-19* (BPS Kota Tanjungpinang, 2024). Namun, pada Maret 2025, penurunan tingkat kemiskinan cenderung melambat, dengan persentase penduduk miskin berada di sekitar 5,96 persen, atau setara dengan 13,47 ribu jiwa, menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan terus menurun, laju penurunannya mulai mengalami stagnasi (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025).

Gambar 1. 1 Persentase Indeks Kemiskinan 2015- 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tren penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari perbaikan ekonomi lokal, khususnya pada sektor perdagangan, jasa, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian kota. Meningkatnya mobilitas ekonomi pascapandemi serta berbagai program sosial pemerintah daerah turut berkontribusi terhadap perbaikan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, kemiskinan di Tanjungpinang masih bersifat struktural, di mana sebagian masyarakat bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap, seperti buruh harian, nelayan kecil, dan pedagang mikro. Ketergantungan ekonomi terhadap sektor jasa dan konsumsi membuat kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok dan ketidakpastian ekonomi (Lestari, 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui

pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makan, maupun nonmakanan. Pengukuran kemiskinan dilakukan berdasarkan garis kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Garis kemiskinan terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM), yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan energi minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, serta Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) yang mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan esensial lainnya. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa garis kemiskinan di Kota Tanjungpinang pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp842.147 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp798.218. Kenaikan ini mencerminkan adanya tekanan harga barang kebutuhan pokok, terutama pangan, yang menjadi komponen utama pengeluaran masyarakat miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin menurun, beban ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat berpendapatan rendah masih cukup tinggi.

Meskipun Kota Tanjungpinang merupakan salah satu wilayah perkotaan yang berkembang di Provinsi Kepulauan Riau, permasalahan sosial berupa kemiskinan masih nyata terjadi di sejumlah kawasan di dalam kota tersebut. Kemiskinan di perkotaan tidak hanya terkait dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga ditunjukkan melalui rendahnya kesejahteraan masyarakat di area tertentu

yang masih bergantung pada pekerjaan informal dan memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar. Menurut Siahaan et al. (2025) tingkat kemiskinan dan tantangan sosial ekonomi di Kota Tanjungpinang masih membutuhkan perhatian melalui intervensi kebijakan yang tepat sasaran dalam menjawab permasalahan kemiskinan perkotaan.

Kelurahan Tanjung Unggat yang berada di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, merupakan wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat beragam. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang, secara administratif wilayah Kelurahan Tanjung Unggat terbagi ke dalam 9 Rukun Warga (RW) dan 43 Rukun Tetangga (RT). Keberadaan RT dan RW memiliki peran penting dalam mengidentifikasi keluarga miskin, memetakan kondisi sosial ekonomi warga, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Masyarakat di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang, memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan dan dinamika pekerjaan informal. Menurut Marchella & Nurhidayah (2025) tingkat kepedulian masyarakat setempat menunjukkan bahwa kondisi sosial komunitas masih mencerminkan tantangan dalam aspek partisipasi dan perilaku kolektif, seperti dalam isu kebersihan lingkungan yang belum sepenuhnya menjadi prioritas bersama, meskipun warga memiliki keterikatan kekerabatan tingkat RT/RW dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi demikian selaras dengan keberadaan pekerjaan sektor informal di wilayah Kelurahan Tanjung Unggat, di mana sebagian besar penduduk bekerja tanpa perlindungan kerja formal, memiliki penghasilan rendah, dan bergantung pada bantuan sosial ataupun kegiatan ekonomi mikro untuk menopang kebutuhan rumah tangga, yang pada gilirannya membentuk pola hidup yang adaptif terhadap ketidakpastian ekonomi sehari-hari. Menurut Afriyadi et al.(2024) kegiatan ekonomi mikro seperti UMKM dan sektor informal lainnya memberi kontribusi nyata bagi pendapatan dan kehidupan ekonomi masyarakat, menunjukkan bahwa karakteristik lokal masyarakat adalah pekerja fleksibel, responsif terhadap peluang usaha kecil, dan sangat bergantung pada dukungan sosial serta jaringan komunitas untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga.

Selain itu masyarakat Tanjung Unggat memiliki beragam macam pekerjaan informal lainnya, seperti nelayan skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga meskipun memiliki berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Nelayan skala kecil umumnya memiliki peralatan tangkap yang sederhana, tingkat pendidikan rendah, dan pendapatan yang fluktuatif, sehingga keberlangsungan hidup rumah tangga mereka sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan yang tidak menentu setiap musimnya. Menurut Handayati et al.(2025) menjelaskan bahwa nelayan skala kecil tidak memiliki alternatif pekerjaan lain saat hasil tangkapan menurun akibat cuaca buruk atau perubahan ekosistem, sehingga anggota keluarga lain ikut membantu tugas rumah tangga dan mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan anak.

Dalam hal pola pekerjaan dan penghasilan, banyak dari mereka bekerja di sektor informal yang hanya berpenghasilan Rp700.000.- hingga Rp1.000.000.- per bulan tergantung dengan lingkungan memungkinkan. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa pekerjaan informal memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kemiskinan. Menurut Rolinta & Hasrat (2025) menjelaskan bahwa pekerja informal terutama di kawasan pendidikan rendah, jam kerja terbatas, dan akses ke pembiayaan mikro yang rendah, memiliki peluang yang lebih besar untuk jatuh kedalam kemiskinan.

Faktor utama yang mendorong kemiskinan di Kelurahan Tanjung Unggat adalah kondisi ekonomi yang lemah, banyak rumah tangga bergantung pada pekerjaan informal dengan pendapatan rendah dan tidak tetap, sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seringkali tergerus oleh fluktuasi ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Menurut Susilo et al. (2024) pekerjaan informal memiliki upah rendah, produktivitas terbatas, dan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi sehingga peluang keluar dari garis kemiskinan menjadi kecil tanpa intervensi struktural.

Faktor pendidikan turut berperan signifikan, rendahnya akses tingkat pendidikan di kalangan keluarga miskin mempersempit akses ke pekerjaan formal dan peluang peningkatan pendapatan. Konsekuensinya anak-anak dari keluarga miskin lebih berisiko putus sekolah atau menunda pendidikan karena tekanan ekonomi. Terdapat informasi masih bahwa hingga september 2025 masih tercatat lebih dari 900 anak-anak di Tanjungpinang yang putus sekolah (Seputarkita. Co, 2025), walau data longitudinal khusus kelurahan/kecamatan belum lengkap,

keberadaan angka lebih dari 900 tersebut menunjukkan bahwa masalah ini masih signifikan dan mungkin tidak secepat penurunan nasional.

Aspek sosial & budaya memperkuat dan memperparah kondisi kemiskinan seperti norma dan kebiasaan masyarakat yang bertradisi pekerjaan informal yang turun-menurun, keterbatasan akses atau keengganan menggunakan bantuan sosial, serta pola konsumsi yang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari daripada investasi pendidikan atau kesehatan yang menjadi penghambat bagi peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Menurut Arina et al. (2024), rendahnya pendidikan dan terbatasnya akses layanan sosial merupakan bagian dari siklus kemiskinan yang sulit dipatahkan.

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Tanjung Unggat menjalani keseharian sebagai nelayan skala kecil dan buruh harian dengan pola kerja yang tidak menentu dan sangat bergantung pada kondisi alam maupun ketersediaan pekerjaan. Nelayan biasanya berangkat melaut sejak dini hari menggunakan perahu kecil dengan peralatan tangkap sederhana, lalu kembali menjelang siang atau sore untuk menjual hasil tangkapan di pasar lokal atau kepada pengepul. Sementara itu, buruh harian bekerja berdasarkan panggilan, seperti buruh bangunan, angkut barang, atau pekerja serabutan, dengan sistem upah harian yang tidak selalu tersedia setiap hari. Ketidakstabilan pendapatan tersebut membuat mereka harus mengatur pengeluaran secara ketat demi memenuhi kebutuhan pangan, biaya sekolah anak, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pemerintah pusat melalui program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menjadi pilar utama dalam mereduksi tekanan ekonomi rumah tangga miskin. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang melengkapinya dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial spesifik kelurahan yang diarahkan untuk menjangkau wilayah-wilayah rentan seperti Tanjung Unggat.

Keluarga miskin yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial seperti PKH, BNT, atau sembako di Kelurahan Tanjung Unggat pada umumnya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan kondisi seperti pendapatan dibawah garis kemiskinan (kurang dari Rp.582.932.- per kapita per bulan menurut standar 2024), pengangguran, kepala keluarga lansia/disabilitas, anak putus sekolah, atau ibu hamil/balita tanpa akses layanan dasar, sering tinggal di kawasan kumuh atau permukiman padat (Pemko Tanjungpinang; Ulasan.co,2025).

Pada tahun 2025 pemerintah Kota Tanjungpinang menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebanyak 1.463 kepada warga penerima bantuan sosial, PKH, dan BPNT. Bagian Kecamatan Bukit Bestari mendapatkan kuota sebanyak 443 warga yang dibagi lagi menjadi 146 kuota untuk Kelurahan Tanjung Unggat (Ulasan.co, 2025). Sementara itu, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 383 keluarga di Kelurahan Tanjung Unggat menerima bantuan PKH dan 519 keluarga menerima bantuan BPNT.

Besaran bantuan yang didapatkan bervariasi tergantung komponen keluarga, misalnya sekitar Rp225.000.- per tiga bulan untuk anak sekolah dasar hingga Rp600.000.- per tiga bulan untuk ibu hamil, lansia atau penyandang disabilitas. Sementara itu, BPNT / Program sembako diberikan dalam bentuk bantuan pangan senilai Rp200.000.- per bulan atau setara Rp600.000.- per tiga bulan yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bagi keluarga nelayan kecil dan buruh harian di Tanjung Unggat, bantuan tersebut umumnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng serta membantu biaya pendidikan anak, sehingga berfungsi sebagai penopang kebutuhan sementara dalam ekonomi keluarga.

Evaluasi empiris terhadap program-program bantuan sosial di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam, kontribusi positif jangka pendek. Peningkatan konsumsi pangan dan penurunan kerentanan akut, namun banyak kajian juga menyoroti keterbatasan dalam hal keberlanjutan dampak ekonomi, inklusi sasaran, kebocoran data, serta kebutuhan untuk menggabungkan bantuan tunai dengan program pemberdayaan ekonomi agar mengarah pada kemandirian. Perlunya perbaikan pada sistem data terpadu penerima manfaat, penguatan kapasitas pelaksanaan ditingkat kelurahan, serta desain program yang mengkombinasikan dukungan konsumsi jangka pendek dan investasi jangka panjang (keterampilan, akses pasar) agar penanggulangan kemiskinan lebih efektif di tempat seperti Tanjung Unggat (Jewed et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian tentang kemiskinan di Indonesia telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus terhadap tingkat makro, seperti ruang

lingkup provinsi ataupun kota, sementara kajian yang menelusuri pola kehidupan masyarakat miskin pada level mikro seperti Kelurahan Tanjung Unggat masih sangat terbatas. Minimnya penelitian spesifik menyebabkan pemahaman terhadap karakteristik sosial ekonomi masyarakat miskin di kawasan pesisir perkotaan seperti Tanjung Unggat menjadi kurang komprehensif. Padahal, pendekatan berbasis wilayah kecil penting karena setiap komunitas miskin memiliki konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang unik, yang tidak selalu dapat digeneralisasi dari data agregat perkotaan.

Selain itu, belum banyak studi yang menggambarkan secara mendalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya kehidupan masyarakat miskin di Tanjung Unggat, khususnya dalam aspek strategi bertahan hidup, pola konsumsi, hubungan sosial, dan nilai-nilai budaya yang memengaruhi keputusan ekonomi rumah tangga. Sebagian besar literatur yang ada masih terbatas pada indikator statistik seperti tingkat kemiskinan atau jumlah penerima bantuan, tanpa mengkaji dimensi kualitatif seperti adaptasi sosial atau pola interaksi komunitas miskin di perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan Potret nyata kemiskinan di tingkat Mikro (Kelurahan) melalui eksplorasi menyeluruh terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat miskin di Tanjung Unggat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, oleh karena itu dapat disimpulkan yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimana

cara masyarakat miskin di Wilayah Tanjung Unggat bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Memahami Pola Kehidupan Masyarakat miskin Tanjung Unggat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi, kesejahteraan sosial serta Kemiskinan masyarakat perkotaan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana Kesehariann Masyarakat miskin di Wilayah Tanjung Unggat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi beragam macam penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tentang kemiskinan yang ada di Kota Tanjungpinang terkhusus daerah Tanjung Unggat.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang cara masyarakat Tanjung Unggat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah keterbatasan ekonomi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, lembaga sosial, dan pemangku kebijakan dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang lebih

tepat sasaran. Dengan memahami pola kehidupan sehari-hari masyarakat miskin, termasuk sumber penghasilan, strategi bertahan hidup, serta pengelolaan kebutuhan dasar, penelitian ini dapat membantu dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang sesuai dengan konteks lokal.

